

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Menjelang akhir tahun 2007, PNPM Mandiri 2008 sudah dipersiapkan. Daftar ancar-ancar lokasi pun telah menyebar ke lapangan. Antusiasme pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin hangat, terlebih setelah diluncurkannya PNPM Mandiri di pertengahan tahun 2007. Gaung nasional PNPM Mandiri telah menjadi trade mark tersendiri, sekaligus sebagai sinyal politik adanya keseriusan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Sebuah program nasional yang menggunakan pendekatan bottom up planning di era reformasi sebagai counter terhadap (kekeliruan) program pembangunan yang menggunakan pendekatan top down planning di era Orde Baru.

Makna tersirat dari peluncuran PNPM Mandiri oleh Pemerintah Indonesia, adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia dalam mencuri perhatian Pemerintah Pusat untuk peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat. Walaupun dalam implementasi dan alokasi anggaran belum bisa dikatakan optimal. Akan tetapi kemenangan politis itu sudah cukup baik sebagai modal dalam menciptakan iklim politik pemberdayaan masyarakat secara nasional. Terbukti dari berbagai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, para Menteri terutama Menko Kesra, Mendagri, dan anggota DPR RI, dan pihak terkait ke berbagai pelosok daerah, telah semakin menambah komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat. Alokasi BLM per kecamatan pun sudah berlipat dari kisaran Rp 500 juta – Rp 1 milyar per kecamatan pada PPK I, II, dan III, maka mulai tahun 2008 meningkat menjadi Rp 500 juta – 3 milyar.

Setiap keberhasilan tidak pernah tanpa konsekuensi. Meningkatnya skala program yang demikian drastis, menuntut perubahan secara menyeluruh dan harus sistematis. Dari PPK yang rekornya hanya mencakup 1264 kecamatan pada tahun anggaran 2002/2003, dan memasuki masa akhir program pada tahun 2006 (Siklus 9) dengan 550 kecamatan dan direncanakan pada tahun 2007 (Siklus 10) dengan 473 kecamatan, dan PPK sudah mempersiapkan skenario exit strategy, tiba-tiba muncul kebijakan PNPM Mandiri. Sehingga mulai tahun 2007 Satker PNPM mandiri harus mengelola lokasi program dengan cakupan 1993 kecamatan di 32 provinsi. Perubahan harus dimulai dari perubahan struktur organisasi, manajemen, MIS, pola komunikasi dan koordinasi para pelaku program hingga perubahan perilaku dan sikap mental.

Menjelang berakhirnya tahun 2007, hal yang mendesak diselesaikan oleh KM-Nasional antara lain: Laporan Akhir PPK II dan merapikan semua kelengkapan data dan informasinya sebelum kita mengalihkan seluruh perhatian ke PNPM Mandiri. Hal yang sama tentunya juga harus dilakukan oleh semua KM-Provinsi tanpa kecuali. Karena dampak dari perubahan organisasi manajemen Korwil ke KM-Provinsi pada awal tahun 2005 lalu,



proses tranformasi (serah terima) data dan informasi program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di samping itu, dengan berkembangnya PPK menjadi program nasional, dengan keberhasilan PPK sebagai salah satu pilar program pemberdayaan masyarakat ini, banyak pihak yang menyoroiti hasil-hasil kegiatan PPK. Salah satu kegiatan yang banyak menyita perhatian publik adalah kegiatan bidang ekonomi, yaitu UEP dan SPP. KM-Nasional dan seluruh jaringan di lapangan perlu bahkan harus segera membenahi data hasil kegiatan itu sehingga dapat menyajikan data-data program yang : utuh, objektif, akurat, aktual, informatif dan memenuhi aspek etika dan estetika penyampaian informasi.

Kegiatan KMN di bulan November 2007, antara lain melakukan tindak lanjut Rakornas Oktober 2007 meliputi : Perkembangan Kegiatan Program, Persiapan PNMP 2008, Evaluasi OJT/IST, dan pengelolaan konsultan dan pengelolaan kelembagaan.

B. KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2007

Kesibukan Konsultan Manajemen Nasional (KMN) PNPM-PPK di bulan November dapat diuraikan antara lain : Seleksi Konsultan, Tindak Lanjut Rakornas Oktober 2007, Persiapan Rakornas Desember 2007, Penanganan Masalah Menonjol : NAD, Papua dan IJB, Bencana, Supervisi Pilot P2SPP. Adapun tindak lanjut Rakornas Oktober 2007 antara lain meliputi : Perkembangan Kegiatan Program, Persiapan PNMP 2008, Evaluasi OJT/IST, dan pengelolaan konsultan dan pengelolaan kelembagaan.

Seleksi Konsultan masih cukup mewarnai kesibukan KMN di di bulan November 2007. Sampai dengan akhir bulan November, dari kuota 5.293 posisi, baru terisi 5.061 posisi sehingga masih diperlukan 232 personal untuk mengisi kekosongan itu. Kekosongan di KMN Jakarta 11 posisi, sisanya tersebar di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Posisi kosong terbanyak adalah posisi Fasilitator Teknis sebanyak 127, kemudian diikuti kekosongan pada posisi FK 29 orang, Konsultan Pendamping UPK dan Posisi di KM Provinsi masing-masing 20 posisi. Perkembangan Kegiatan Program, Hingga Akhir November 2007, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Program.

Kegiatan utama KMN pada bulan November 2007 terkait dengan Bbidang Pengembangan Program, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. IEC, melakukan pembuatan audiovisual, rapat mengenai Strategi Komunikasi PNPM di kantor Departemen Kominfo, integrasi MIS PNPM di kantor Bappenas, dsb.
- b. Training, melakukan Supervisi dan Monitoring untuk pelaksanaan kegiatan Semiloka P2SPP dan pelaksanaan shooting film pelatihan Kader Pemberdayaan serta melakukan persiapan untuk kegiatan Orientasi/pembekalan pratugas dan Rakornas periode Desember 2007.



- c. Keuangan Mikro, melakukan konsolidasi laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas,
- d. Pendidikan Masyarakat, Melatih penyegaran FK Pendidikan, monitoring pelatihan/IST pra tugas FK PNPM Generasi, pengumpulan data PNPM Generasi, membuat laporan kegiatan kesehatan masyarakat,
- e. Rehabilitasi Pasca Bencana, antara lain melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam di Bengkulu dan Sumatera Barat,
- f. PNPM Generasi, melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pelaku program baik berupa penguatan kapasitas masyarakat maupun aparat, dan melakukan Persiapan pelaksanaan Orientasi bagi konsultan baru, baik untuk Jakarta maupun provinsi,
- g. Green KDP, Kesehatan Masyarakat, SADI dan Pemberdayaan Perempuan, belum banyak aktivitas karena tenaga profesional yang direkrut baru aktif pada awal Desember 2007.

2. Pengendalian Program.

Beberapa kegiatan KMN terkait dengan Bidang Pengendalian Program, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kinerja Konsultan, yaitu melakukan penanganan masalah yang menonjol antara lain melakukan evaluasi kinerja Konsultan provinsi : NAD dan Sulawesi Tengah,
- b. Pengendalian Penyerapan Dana Program, antara lain melakukan verifikasi dan validasi data-data SP2D dan rekening BI dan BRI, menyusun dan memantau progres penyerapan dana BLM, memverifikasi RPD dari provinsi, dan melakukan penginputan dokumen SP2D dan rekening BI.
- c. Penanganan dan Pengaduan Masalah, yaitu penyusunan laporan penanganan masalah bulan Oktober 2007 (narasi dan matrik), tindak lanjut pengaduan yang masuk (surat, website ataupun sms) dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Sp. Monev dan asisten Sp. Monev triwulan II dan III;
- d. Sistem Informasi dan Manajemen , melakukan komonikasi data dari Provinsi ke Nasional, dan mengumpulkan Laporan baik Mingguan maupun Bulanan.

3. Persiapan PNPM Mandiri TA 2008

Dalam persiapan implementasi PNPM Mandiri TA 2008, KM-Nasional melakukan berbagai kegiatan termasuk merealisasi RKTL hasil Rakornas Oktober 2007. Beberapa kegiatan utama yang dapat dilaporkan, antara lain :

- a. Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan TA 2008
- b. Rekrutmen konsultan
- c. Finalisasi PTO PNPM Mandiri
- d. Persiapan Pelatihan TOT
- e. Persiapan para tugas konsultan



II. KEMAJUAN PROGRAM

A. KEMAJUAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Tahapan Kegiatan PPK II

PPK II memiliki cakupan kegiatan sebanyak 1264 kec (DIPA TA 2002/2003 – Siklus 4), 964 kec (DIPP TA 2004 – Siklus 5) dan 868 kec (DIPA TA 2005 – Siklus 6). Secara keseluruhan kegiatan PPK II yang meliputi Siklus 4, 5 dan 6 sudah selesai. Hanya saja masih terdapat beberapa desa di Kep. Nias, akibat adanya bencana tsunami tahun 2004, sampai saat ini belum menuntaskan MDST (Musyawarah Desa Serah Terima) maupun MD Khusus.

Pada Siklus 4 di Sumatera Utara masih terdapat 2 desa, yaitu Desa Tilitoliga, Kec. Lolowau di Kab. Nias, dan Desa Banua Sibauhau, Kec. Alasa di Kab. Nias. Sedangkan Siklus 5 masih terdapat 16 desa di 4 kecamatan juga terdapat di Nias, Sumatera Utara. Sedangkan Siklus 6 sudah 100% melakukan MDST / MD Khusus.

2. Tahapan Kegiatan PPK III

Implementasi PPK III terlaksana dalam 3 siklus dari 4 siklus yang direncanakan, menyusul diluncurkannya PNPM-PPK 2007. PPK IIIA (Siklus 7-8) dilaksanakan dengan DIPA TA 2005 dan 2006), dan PPK IIIB (Siklus 9-10) dilaksanakan dengan alokasi DIPA TA 2007-2008. Progres Siklus 7 sudah 100% desa melaksanakan MDST. Dan Siklus 8 sampai akhir November 2007 masih menyisakan 11 desa di 7 kecamatan. Yaitu 8 desa di NTT dan 3 desa Sulawesi Utara. Siklus 9 yang terdiri dari 550 kecamatan, masih terdapat 14 desa di 10 kecamatan, yaitu di Sumatera Utara (8 desa), NTT (1 desa), Kalimantan Tengah (3 desa), dan Maluku (2 desa).

3. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri – Perdesaan

PNPM Mandiri Siklus 10, merupakan lokasi PNPM Mandiri kelanjutan dari PPK IIIB. Jumlah kecamatan semula sama dengan Siklus 9, namun karena sebagian masuk P2KP, maka jumlahnya menjadi 473 kecamatan. Dari 28 provinsi, baru 10 provinsi yang sudah mencairkan dana APBN lebih dari 50%, yaitu : Sumatera Barat (78%), Jambi (90%), Sumatera Selatan (58%), Jawa Tengah (61%), Bali (93%), NTB dan NTT (75%), Kalsel (95%), Sulawesi Tengah (53%) dan Sulawesi Barat (81%).

Sementara itu, kegiatan PNPM Mandiri di Lokasi Baru (lokasi PNPM Mandiri yang sama sekali belum pernah menjadi lokasi PPK I, II, dan III ataupun lokasi phase out. Status progres PNPM lokasi baru per akhir November 2007, masih terdapat 2 provinsi yang sama sekali belum melakukan pencairan dana APBD, yaitu: Bengkulu dan Kalimantan Barat. Sedangkan provinsi DIY, memang tidak ada chost saring dari



APBD, sehingga langsung ke tahap pencairan APBN karena kegiatan PNPM menggunakan Pola Khusus Rehabilitasi.

B. PENYERAPAN BLM PNPM MANDIRI

Cakupan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan DIPA TA 2007 sebanyak 1.993 kecamatan, tersebar di 32 provinsi. Sampai dengan akhir November 2007, telah diperoleh data kecamatan yang batal mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan TA 2007 sebanyak 22 kecamatan. Dari 22 kecamatan itu tercatat dari Provinsi Jambi 9 kecamatan di 2 kabupaten, yaitu Kab. Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Kalimantan Timur 5 kecamatan dari 2 kabupaten, yaitu Kab. Malinas (4 kec) dan Kab. Bulongan (1 kec). Sehingga jumlah kecamatan yang terus dipantau sejumlah 1971 kecamatan. Jumlah ini masih harus dikurangi lagi dengan lokasi di Papua dan Irian Jaya Barat sebanyak 118 kecamatan, karena akan diperlakukan dengan pola khusus. Sehingga cakupan kegiatan PNPM Mandiri TA 2007 reguler sebanyak 1.724 kecamatan.

Berdasarkan dokumen yang diterima dari lapangan dan dari Departemen Keuangan progres penyerapan kumulatif BLM dari 1.971 kecamatan tersebut, sampai dengan tanggal 30 November 2007, sebagai berikut : BLM cost sharing Rp 153.093.860.130, BLM APBN Rp 272.218.987.575. Total penyerapan BLM sebesar Rp 425.312.847.705,- atau 21,68% dari total alokasi.

C. PENYERAPAN DOK PNPM MANDIRI

1. DOK Perencanaan

Total penyerapan dana DOK Perencanaan sampai dengan 7 Desember 2007 sebesar Rp 63.648.893.150 atau 72,3% dari total alokasi sebesar Rp 88.110.000.000,-. Rata-rata penyerapan sampai dengan tahap II. Provinsi yang penyerapan DOK masih kurang dari 50% adalah Provinsi Kalimantan Barat (45%), Nias (49%), Papua (35%), dan IJB (47,2%).

2. DOK Pelatihan Masyarakat

Penyerapan dana DOK Pelatihan Masyarakat sebesar Rp 31.718.384.350 atau 79,8% dari alokasi sebesar Rp 39.753.770.000,-. Provinsi yang sudah mencairkan DOK Pelatihan Masyarakat 100% adalah Provinsi Banka Belitung, Banten, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sedangkan Kalimantan Timur (6,3%), Maluku (11,7%), NTB (27%), Kepri (40,2%), Papua (54%) dan Kalimantan Tengah (57%) penyerapan DOK masih relatif sedikit.

3. DOK Pelatihan UPK – Microfinance

Sedangkan untuk alokasi DOK Pelatihan UPK Microfinance sebesar Rp 6.910.000.000 sampai dengan 7 Desember 2007 telah terserap sebesar Rp 6.045.000.000,- atau 87,5% dari alokasi.



III. PENGEMBANGAN PROGRAM

C. UNIT KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

1. Kegiatan Bulan November 2007

Setelah mengalami sedikit kegiatan pada bulan Oktober, maka pada bulan Nopember ini unit KIE sudah memiliki sejumlah tugas yang cukup penting di awal bulan karena adanya even nasional yaitu Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyebaran informasi dan dukungan sosialisasi PNPM yang dilaksanakan melalui PPK (PNPM-PPK) yang telah dilakukan selama ini. Di samping itu, upaya penyebaran informasi dilakukan melalui media atau sarana yang sudah ada di PPK antara lain penggandaan video presentasi PPK, penerbitan Buletin PPK, Penyajian dalam situs internet PPK dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi PNPM Mandiri seperti penggunaan media promosi PNPM Mandiri.

2. Pengembangan Program KIE PPK

Selaras dengan fokus pelaksanaan kegiatan KIE, maka pada bulan Nopember 2007 telah dilakukan beberapa hal terutama berkaitan dengan sosialisasi dan pengenalan PPK kepada sejumlah stakeholders. Adapun langkah-langkah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan bulan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sejumlah materi dan dukungan ke lapangan untuk lebih mensosialisasikan PNPM Mandiri secara umum dan PNPM-PPK secara khusus.
- b. Penyebaran atau diseminasi berita yang berkaitan dengan PPK baik melalui jaringan e-mail maupun situs internet PPK.
- c. Pemutakhiran dan pengumpulan informasi maupun profil lokasi PPK hingga bisa dipublikasikan.
- d. Pengkoordinasian proses sosialisasi dengan program lain berkaitan dengan adanya PNPM Mandiri.
- e. Membantu pengembangan materi iklan untuk PNPM-Mandiri
- f. Berusaha membangun komunikasi yang intens dan menguntungkan dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Kendala

Sebagaimana yang terjadi pada bulan sebelumnya, beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan selama bulan Nopember adalah:



- a. Karakter PNPM-PPK yang memiliki sifat dinamis baik program maupun datanya sehingga pengembangan dan perbaikan dalam mengelola situs internet PPK.
- b. Tidak adanya anggaran khusus untuk pengembangan media yang sifatnya insidental. Dapat dikatakan masih belum maksimalnya dukungan pelaksanaan program yang disiapkan KIE sehingga upaya pengembangan perlu memanfaatkan momen-momen tertentu seperti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional.
- c. Organisasi unit yang baru belum efektif berjalan sehingga kendala yang seharusnya tidak perlu terjadi masih dialami. Akan tetapi komunikasi yang intens sudah mulai dibangun.
- d. Adanya rencana pindah lokasi kantor namun perangkat pendukung seperti internet belum terpasang sehingga sudah meminta dispensasi untuk belum pindah.
- e. Belum aktifnya semua pelaku PPK di daerah untuk mengirimkan foto dan artikel yang dapat diinformasikan ke masyarakat luas selain komitmen yang dibangun pada Rakor bulan Juli 2007 masih belum berjalan maksimal.
- f. Belum rampungnya strategi komunikasi PNPM Mandiri yang menjadi rujukan pengembangan strategi komunikasi PNPM-PPK.

Atas, kendala-kendala tersebut, maka unit KIE telah mencoba untuk mensiasati secara proaktif kendala-kendala yang ada, namun belum semuanya tercapai dan akan ditindaklanjuti pada bulan berikutnya. Diantaranya adalah dengan menempuh langkah inisiatif untuk menyusun rencana kerja dan anggaran KIE PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2008 dimana hal ini telah direstui oleh satuan kerja pengelola kegiatan PNPM-PPK.

4. Rekomendasi

Sebagai upaya untuk menangani kendala yang ada dan pemenuhan rencana yang telah disiapkan, maka telah disusun sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

- a. Segera disusun rencana kegiatan KIE untuk tahun 2008 yang lebih terperinci baik jenis kegiatan maupun anggaran yang digunakan.
- b. Sudah adanya kepastian resmi organisasi KIE yang baru berjalan secara efektif dan memiliki landasan yang kuat.
- c. Adanya dukungan dari konsultan baik dari tingkat nasional maupun provinsi untuk mendukung proses atau kegiatan yang dijalankan oleh KIE terutama berkaitan dengan komitmen yang dibangun.
- d. Dukungan dari unit lain dalam menyediakan dan mengisi informasi yang ditampilkan oleh situs internet PPK.
- e. Perlu dibuat penegasan agar para pelaku PPK lebih aktif dalam memberikan informasi dari lapangan.



D. UNIT PELATIHAN

Kegiatan umum yang dilakukan oleh Unit Training pada bulan Nopember 2007 antara lain Supervisi dan Monitoring untuk pelaksanaan kegiatan Semiloka P2SPP dan pelaksanaan shooting film pelatihan Kader Pemberdayaan serta melakukan persiapan untuk kegiatan Orientasi/pembekalan praturgas dan Rakornas periode Desember 2007.

Untuk lengkapnya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh unit training dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- a. Supervisi dan monitoring untuk pelaksanaan Semiloka P2SPP, di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
- b. Supervisi dan monitoring untuk pelaksanaan shooting film pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, di Kabupaten Klaten – Jateng.
- c. Persiapan Orientasi/Pembekalan untuk konsultan baru di Hotel Ibis – Mangga Dua. Jumlah Peserta sebanyak 116 Orang yang terdiri dari Konsultan Nasional, Regional, dan Provinsi. Hasil kegiatan adalah :
 - Tersiapkannya TOR, jadwal dan agenda pelaksanaan Orientasi/ Pembekalan Praturgas.
 - Terkoordinasinya seluruh persiapan Rakornas kepada KM Provinsi (Korprov dan jajarannya), Spesialis Training Regional, Spesialis di NMC, Sekretariat PMD, dan PT. Amythas.
 - Tersiapkannya bahan dan materi yang akan digunakan oleh Tim Training untuk pembahasan materi pada kelas Sp. Training Regional.

E. UNIT PENDIDIKAN

i. Progres Kegiatan Pilot Pendidikan

Kegiatan di bulan November 2007 fokus pada kegiatan proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara lokasi PNPM-PPK dan non PNPM-PPK. Pada lokasi PNPM PPK progresnya cenderung lebih cepat dibanding lokasi non PNPM. Hal ini disebabkan karena pada lokasi PNPM-PPK sudah ada proses MMDD dan telah melakukan proses penggalian gagasan sampai MAD II. Hanya saja tahapan ini belum dilanjutkan dengan kegiatan perengkingannya prioritas usulan kekgiatan. Pada lokasi Non PNPM PPK, maka kegiatan harus dimulai dengan MAD Sosialisasi.

Secara umum keterlambatan proses kegiatan terjadi di Kab. Bolaang Mongondow, Kec. Anjir Pasar – Kab. Barito Kuala. Tahapan kegiatan masih dalam proses persiapan pelatihan KPMD. Sedang proses tercepat terjadi di Kec Dalam, Kabupaten Mamasa yang telah mencairkan dana BLM sebesar 69% dan Kec. Tinambung yang telah mencairkan dana 100%. Kedua



kabupaten ini dapat mencairkan dana karena mereka menggunakan MMDD yang telah difasilitasi oleh FK reguler, sehingga prosesnya lebih fokus pada review terhadap proses perencanaan dan kegiatan yang diusulkan.

ii. Penyerapan Dana

Penyerapan dana BLM, DOK Pendidikan dan DOK Komite Sekolah hingga per akhir November 2007, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Penyerapan Dana Pilot Pendidikan per November 2007

<u>No</u>	<u>Sumber Dana</u>	<u>Alokasi (Rp)</u>	<u>Penyerapan (Rp)</u>	<u>%</u>
1.	BLM	4.275.000.000	630.000.000	15
2.	DOK Pendidikan	665.000.000	465.000.000	70
3.	DOK Komite Sekolah	760.000.000	520.000.000	68

iii. Masalah dan Hambatan

1. Di Kec. Lolayan dan Bolaang – Kab. Bolaang Mongondow, dan Kec. Anjir Pasar-Kab. Barito Kuala, keterlambatan disebabkan adanya negosiasi dengan kecamatan pemekaran yang tidak segera selesai. Dimana baik kecamatan induk maupun kecamatan pemekaran harus berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilot Pendidikan. Dasar dari ini adalah sekolah Pilot yang dipilih masih termasuk dalam kecamatan induk maupun pemekaran. Surat dari PMD sudah disampaikan ke lapangan, namun datangnya terlambat.
2. Sedangkan Kec. Anjir Pasar, Kab Barito Kuala, keterlambatan disebabkan karena FK-Pn yang harus memfasilitasi mengalami kecelakaan, sedangkan lokasi yang difasilitasi adalah lokasi Non PNPM.
3. Baik DOK perencanaan dan DOK Komite Sekolah di Kab. Bolaang Mongondow dan Minahasa Selatan telah dicairkan 100 % adanya permintaan KPPN yang menyampaikan informasi bahwa bila closing date Netherland Grant tanggal 31 desember 2007, maka dana tidak akan diluncurkan kembali.
4. Di Kabupaten Barito Kuala tidak semua desa dalam kecamatan ikut berpartisipasi karena keterbatasan dana BLM.
5. Belum adanya tempat untuk dana Block Grant Kabupaten dalam DIPA maupun perusahaan KM Kab, sehingga kegiatan peningkatan mutu yang menggunakan dana Block Grant ini belum dapat dieksekusi pada tahun 2007.



iv. Rekomendasi

- a. Surat rekomendasi tentang keikutsertaan kecamatan pemekaran dalam pelaksanaan Pilot Pendidikan I dapat disosialisasikan kembali. Harapan ke depan hal yang berkaitan dengan kebijakan, agar dapat diinformasikan lebih cepat.
- b. Mengingat DOK pendidikan dan DOK Komite Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan dan Polewali Mandar telah dicairkan 100 % sementara kegiatan belum memerlukan dana yang cukup banyak, maka KM Kab dan FK perlu melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kedua DOK tersebut. NMC kiranya perlu mengingatkan kepada Korprov tentang kondisi ini.
- c. Dana Block Grant segera dipastikan untuk penempatannya, dengan demikian proses peningkatan kapasitas pelaku pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat segera direalisasikan pada awal tahun 2008. NMC perlu berkoordinasi dengan PMD dan Depdiknas untuk persiapan pelatihan penyegaran bagi Tim Teknis pendidikan. Identifikasi pelatih yang profesional dan sesuai dengan program perlu segera dilakukan.

F. UNIT KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan November 2007 masih melanjutkan kegiatan pada bulan yang lalu, yakni menyusun panduan untuk supervisi monitoring yang efektif.

G. UNIT PNPM GENERASI

1. Pelatihan/IST Pra tugas FK Generasi

1. Pelatihan/IST dilakukan pada dua provinsi yakni di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan mengingat dua provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki lokasi yang kosong.
2. IST dilaksanakan selama 11 hari dan materi IST mengacu pada materi pelatihan pra tugas FK generasi.
3. Peserta yang dilatih ada 6 orang (FK : 2 orang, FT: 1 orang, KMT : 2 orang, KMP : 1 orang) untuk Provinsi Gorontalo dan 3 orang (FK : 3 orang) untuk provinsi Jawa Timur.
4. Semua peserta hadir kecuali 1 FK di Gorontalo mengundurkan diri.
5. Pelatih terdiri dari KM-Nasional: 2 orang, Bank Dunia: 2 orang, KM-Kabupaten : 2 orang, KMT : 1 dan Monev Prov : 1 orang.

2. Supervisi dan monitoring pelaksanaan PNPM Generasi.

a. Di Jawa Timur

- Di Kabupaten Magetan, Trenggalek, Malang dan Nganjuk, kegiatan telah sampai pada tahap pencairan BLM 40%, dan telah disalurkan



dalam rekening Pokja Pendidikan dan Kesehatan, mengingat kegiatannya cukup lama dan multi years.

- Sedang di Kabupaten Pamekasan, telah sampai pada pelaksanaan kegiatan.
 - Jenis kegiatan yang didanai antara lain : pengadaan pakaian, alat bantu sekolah.
1. Di Gorontalo, kegiatan telah sampai pada tahap pengajuan dana cost sharing dan BLM untuk dana grant di KPPN.
 2. Di Jawa Barat, kegiatan telah sampai pada tahap pelaksanaan di lapangan dan telah dilakukan pemantauan oleh FD maupun FK.
 3. Di NTT, kegiatan sudah sampai pada tahap penyaluran dana ke desa.
 4. Di Sulawesi Utara kegiatan telah sampai pada pengusulan dana cost sharing daerah.
3. Bahan/material sosialisasi
- a. Bahan / material sosialisasi meliputi : PTO, flipchart, info kit dan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), buku kupon dan stempel kupon.
 - b. Buku KIA, Buku Kupon dan stempel telah didistribusikan ke semua provinsi. Distribusinya mengalami keterlambatan karena penomoran buku Kupon dikerjakan secara manual. Dari rencana minggu pertama November telah didistribusikan, namun baru terealisasi pada minggu 1 bulan Desember 2007.
 - c. Pembahasan tentang generasi super dan field test untuk generasi super. Kegiatan ini akan dipergunakan untuk mempromosikan PNPM Generasi melalui poster dan leaflet, selanjutnya akan dikembangkan dalam bentuk radio dan video training.
4. Masalah /Hambatan
- a. Masalah implementasi kegiatan lapangan
 - Masih ada kepala desa yang kurang memahami tentang PNPM generasi, sehingga proses pelaksanaan tidak sesuai dengan mekanisme yang diharapkan.
 - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang PNPM Generasi yang diakibatkan sosialisasi kurang matang, dan tidak adanya alat komunikasi seperti flipchart yang dapat dijadikan media pembelajaran masyarakat.
 - Fasilitator masih belum memahami substansi pendidikan dan kesehatan.
 - Di Jawa Timur, ada pemahaman yang keliru tentang penggunaan rekening Pokja, FK dan masyarakat berfikir dana harus semuanya masuk Pokja, sementara ada kegiatan yang sebenarnya dapat didanai langsung lewat UPK yang menyalurkan langsung ke Pelaksana Kegiatan.
 - FK kurang memantau pelaksanaan pemetaan kesehatan dan pendidikan serta penggalan gagasan yang difasilitasi oleh FD,



sehingga data yang diperoleh tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan. Bahkan ditemukan proses pendanaan sasaran baru di final kan pada MAD alokasi dana, seharusnya data ini sudah final pada rapat TPK 1.

- Dalam pembuatan desain dan RAB, masyarakat, TPK dan FD kurang didampingi oleh FK/FT oleh sehingga kegiatan yang didanai oleh program tidak sesuai dengan kebutuhan pemanfaat. Sebagai contoh, dua kecamatan mempunyai usulan pembelian sepatu anak sekolah tanpa dikur terlebih dahulu, sehingga pada waktu pembagiannya tidak bermanfaat.

b. Penyedia Layanan

- Di beberapa lokasi penyedia layanan kesehatan dan pendidikan belum memahami tentang peran dan tugasnya.
- Penyedia layanan kesehatan masih ada yang tidak melayani kebutuhan masyarakat miskin karena adanya PNPM generasi. Sebagai contoh di kecamatan Kauditan – kabupaten Minahasa Utara- provinsi Sulawesi Utara, semua imunisasi dan pemberian fee untuk masyarakat harus dimasukkan dalam anggaran PNPM generasi.

c. Pelatihan/IST Pra tugas FK Generasi

- Pada saat perencanaan, secara lisan telah disepakati antara PMD, WB dan NMC, bahwa pelatihan/IST bagi FK generasi untuk mengisi lokasi kosong akan dilaksanakan selama 4 hari efektif, namun setelah berjalan, pelatihan/IST bisa dikatakan eligible jika pelaksanaan pelatihan/IST dilaksanakan 11 hari.
- Keterlambatan pencetakan yang mengakibatkan distribusi buku KIA dan buku Kupon terlambat, maka membuat FD/Kader harus mencatat hasil pemeriksaan, penimbangan, imunisasi dan lain-lain dalam format 13. Setelah buku datang maka diperlukan waktu untuk memindahkan catatan pada Buku KIA dan Buku Kupon sehingga banyak terjadi kekeliruan.

5. Rekomendasi

- a. Spesialis Generasi perlu melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi langsung ke lapangan. Perlu mengatur supervisi monitoring bagi lokasi-lokasi yang sangat memerlukan perhatian khusus.,
- b. KM Kab perlu melakukan pendampingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM Generasi di lapangan, mengingat masih banyak FK yang kurang mampu dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat.



- c. KM Kab Perlu melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan terutama berkaitan dengan pemantauan pencapaian minimum indikator yang telah disepakati bersama masyarakat.
- d. KM Kab lebih intensif untuk melakukan koordinasi dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, agar bersedia mendukung dan bekerjasama dalam implementasi kegiatan generasi . Dengan demikian peran dan tugas penyedia layanan difahami dengan jelas dan tujuan dari PNPM generasi dapat tercapai.
- e. Untuk ke depan pelatihan Pratugas dan penyegaran yang melalui IST maupun klasikal perlu dibahas secara bersama dengan WB, PMD dan KM-Nasional dengan dikeluarkan surat resmi setelah disetujuinya NOL oleh Bank Dunia, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Pencetakan material sebaiknya dilaksanakan sebelum kegiatan berjalan sehingga proses di lapangan lebih lancar dan masyarakat tidak bingung.



IV. PENGENDALIAN PROGRAM

H. UNIT PENANGANAN MASALAH

Laporan bulanan periode November 2007 untuk beberapa provinsi menggunakan laporan bulan sebelumnya (Oktober 2007). Hal ini karena hingga batas waktu yang telah ditentukan, provinsi tersebut belum mengirimkan laporannya dengan berbagai alasan. Provinsi tersebut diantaranya: Bali, Banten, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.

1. Jumlah Masalah Berdasarkan Matrik Masalah

Pada bulan ini terdapat satu revisi kategori penyimpangan dana pada provinsi Jawa Barat dari laporan bulan sebelumnya dimana satu kasus di Tasikmalaya digabungkan dengan kasus lainnya pada lokasi yang sama.

Secara nasional, jumlah masalah mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Total masalah pada bulan November 2007 mengalami kenaikan sebanyak 9 kasus menjadi 869 masalah yang terdiri atas 828 masalah sisa bulan lalu ditambah 41 masalah baru bulan November 2007. Dari 828 masalah sisa bulan Oktober tersebut, terdapat 25 masalah telah ditangani sampai selesai pada bulan November 2007 dan 803 masalah masih dalam proses penanganan sedangkan dari 41 masalah baru pada bulan ini, 14 masalah langsung dilaporkan selesai dan 27 masalah masih dalam proses penanganan. Masalah baru dilaporkan yang langsung selesai terjadi di provinsi DIY (2 kasus), Jawa Tengah (1), NAD (8), Sulawesi Selatan (1), dan Sumatera Barat (2). Provinsi NAD banyak yang dilaporkan selesai karena pada bulan sebelumnya (Oktober 2007) menggunakan laporan bulan September 2007 sehingga kasus yang selesai bulan Oktober 2007 baru dilaporkan pada bulan November 2007.

Secara keseluruhan, total masalah yang ditangani pada bulan November 2007 berjumlah 869 masalah, 39 masalah selesai ditangani dan 830 masalah masih dalam proses penanganan. Rekapitulasi perkembangan dan status penanganan masalah dalam 3 bulan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Penanganan Masalah

No	Bulan	Periode	Kategori Masalah					Jumlah	%
			1	2	3	4	5		
1	Sept-07	S/d Bulan Lalu	98*	678*	4*	7*	38	825*	
		Baru	1	22	0	3	13	39	4,5%
		Total	99	700	4	10	51	864	
		Selesai	9	13	1	1	13	37	4,3%
		Dalam Proses	90	687	3	9	38	827	95,7%



No	Bulan	Periode	Kategori Masalah					Jumlah	%
			1	2	3	4	5		
2	Okt-07	S/d Bulan Lalu	90	686*	3	9	37*	825*	
		Baru	7	22	0	1	5	35	4,1%
		Total	97	708	3	10	42	860	
		Selesai	5	16	0	3	7	31	3,6%
		Dalam Proses	92	692	3	7	35	829	96,4%
3	Nov-07	S/d Bulan Lalu	92	691*	3	7	35	828	
		Baru	3	25	1	8	4	41	4,7%
		Total	95	716	4	15	39	869	
		Selesai	7	21	1	2	8	39	4,5%
		Dalam Proses	88	695	3	13	31	830	95,5%

Keterangan Tabel di atas:

*) : Revisi untuk laporan bulan September dan Oktober 2007

Kategori 1 : Penyimpangan prinsip dan prosedur Kategori 4 : Force Majeur

Kategori 2 : Penyalahgunaan dana

Kategori 5 : Lain-lain

Kategori 3 : Intervensi

2. Jumlah Pengaduan Melalui KM-Nasional

Jumlah SMS yang masuk melalui unit pengaduan masalah pada bulan November 2007 adalah 24 pengaduan yang berasal dari 8 provinsi, yaitu : NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan DIY. Pengaduan-pengaduan tersebut terdiri atas 7 pengaduan bersifat informatif, 4 bersifat manajerial, 6 bersifat implementasi dan 7 pengaduan lainnya.

3. Sumber Pengaduan/Temuan

Berdasarkan matrik masalah bulan November 2007, terdapat 31 masalah baru yang dilaporkan oleh konsultan, 9 masalah baru dilaporkan oleh masyarakat dan 1 masalah baru dilaporkan hasil misi Bank Dunia. Secara keseluruhan, konsultan masih sebagai pelapor/ penemu terbanyak dengan 748 masalah, disusul pengaduan langsung masyarakat dan audit BPKP.

Sumber pengaduan yang paling rendah adalah media massa dengan 3 masalah. Temuan audit BPKP belum semuanya dimasukkan dalam matrik masalah karena menggunakan format yang berbeda dari provinsi.

Perincian sumber pengaduan masalah pada periode November 2007 dapat dilihat pada tabel III berikut ini:

Tabel 3. Sumber Pengaduan/Masalah

No	Sumber	Jumlah Masalah yang Disampaikan			Prosentase Jumlah terhadap Total
		Sisa Oktober 2007	Baru November 2007	Jumlah	
1	Konsultan	717	31	748	86,08%
2	Masyarakat	58	9	67	7,71%
3	Audit BPKP	30		30	3,45%



No	Sumber	Jumlah Masalah yang Disampaikan			Prosentase Jumlah terhadap Total
		Sisa Oktober 2007	Baru November 2007	Jumlah	
4	Lain-lain	10		10	1,15%
5	LSM/PBM	7		7	0,81%
6	Supervisi BD	3	1	4	0,46%
7	Media Massa	3		3	0,35%
	Total	828	41	869	100,0%

4. Pelaku Pelanggaran/Masalah dalam Kegiatan PNPM-PPPK

Seiring bertambahnya jumlah masalah, total pelaku pelanggaran/ masalah dalam kegiatan PPK mengalami kenaikan sebanyak 11 dari bulan sebelumnya menjadi 1093 orang. Pada bulan ini terdapat 40 pelaku baru yang dilaporkan, diantaranya 10 pelaku masyarakat/ kelompok, 10 pelaku lain-lain dan 7 pelaku UPK.

Secara keseluruhan, pelaku masalah/pelanggaran pada bulan ini masih didominasi oleh kelompok/ masyarakat sebanyak 274 orang disusul pelaku masalah/pelanggaran terbanyak kedua adalah UPK sebanyak 256 orang dan pelaku pelanggaran terbanyak ketiga adalah TPK sebanyak 169 orang. Tabel berikut menggambarkan jumlah pelaku masalah/pelanggaran dalam kegiatan PPK pada bulan November 2007.

Tabel 4. Pelaku Masalah/Pelanggaran

No	Pelaku	Banyaknya Pelaku			Prosentase Jumlah terhadap Total
		Sisa Oktober 2007	Baru November 2007	Jumlah	
1	Masyarakat/Kelompok	264	10	274	25,07%
2	UPK	249	7	256	23,42%
3	TPK	168	1	169	15,46%
4	Konsultan	94	10	104	9,52%
5	Kades/Aparat Desa	81	1	82	7,50%
6	Lain-lain	66	10	76	6,95%
7	PjOK dan Staf Kecamatan	50	1	51	4,67%
8	LKMD/LPM	49	0	49	4,48%
9	Camat	20	0	20	1,83%
10	Suplier	12	0	12	1,10%
	TOTAL	1053	40	1093	100,0%

5. Status Progres Penanganan Masalah

a. Penanganan Masalah Derajat 4 dan Masalah Yang Sulit Diselesaikan

Jumlah masalah derajat 4 pada bulan November ini tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya yaitu 14 kasus, yang terdiri atas 1 kasus masalah penyimpangan prinsip dan prosedur, 12 kasus masalah penyimpangan dana dan 1 kasus masalah lainnya. Masalah yang dinilai sulit diselesaikan berdasarkan data dari provinsi tidak mengalami



perubahan dari bulan sebelumnya yaitu 152 masalah. Kemungkinan jumlah ini akan berubah setelah konsultan pusat atau provinsi melakukan verifikasi lapangan yang hingga saat ini belum bisa dilaksanakan.

NMC dan Sekretariat PPK Pusat masih tetap mengagendakan upaya khusus untuk penataan kasus – kasus yang tergolong sulit diselesaikan. Dukungan lain terhadap kasus-kasus berderajat 4 yang masih terbuka peluang penanganan adalah melalui supervisi dan monitoring penanganan masalah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Korprov dan Sp.MonEv dalam rangka mendiskusikan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan penanganan masalah.

b. Masalah Menonjol/ Prioritas

Enam masalah yang dianggap menonjol pada bulan lalu belum selesai penanganannya hingga sekarang sehingga dimunculkan kembali dalam bulan ini sebagai masalah menonjol. Kasus-kasus tersebut berasal dari provinsi Jawa Barat , Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Jawa Tengah.

- Kecamatan Pusakanagara, kabupaten Subang, provinsi Jawa Barat: Penyalahgunaan dana oleh ketua UPK yaitu Sdr. Maksun dan diindikasikan melibatkan TK PPK saat itu (sdr. Nasrun). Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pendamping UPK, nilai dana yang diselewengkan mencapai Rp. 647.384.907. Modus operandi yang dilakukan hampir sama dengan kasus Darangdan, yaitu pemalsuan semua buku rekening UPK dan rekening koran, specimen rekening UPK hanya satu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketua UPK dengan leluasa menyimpan dan mengambil uang. Pada bulan April berkas telah sampai di kejaksaan dan sedang dalam proses penyelidikan dengan memanggil pelaku-pelaku PPK tingkat kabupaten dan kecamatan baik yang pernah ataupun yang sedang bertugas di lokasi tersebut. Pada awal Juli 2007, tersangka ditahan dalam rangka proses penyidikan. Selain itu juga masih dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap saksi-saksi , baik itu pengurus UPK maupun dari NMC. Hingga akhir September 2007, proses penyidikan oleh kejaksaan baru mencapai 75 %. Pada tanggal 14 November 2007 telah digelar sidang pertama sehingga kasus dinyatakan selesai.
- Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan: Penyimpangan prinsip dan prosedur serta penyimpangan dana dalam pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada tiga desa. Kasus yang terjadi adalah adanya perubahan desain dari kincir air ke turbin serta pekerjaan tidak sesuai dengan desain dan RAB. Disamping itu terjadi penyimpangan dana cukup besar yang dilakukan oleh supplier



sebesar Rp. 208.123.178,-. Pada tanggal 25 Januari 2007, FK, PjOK dan TPK mengadakan pertemuan yang hasilnya PjOK akan menyurati supplier untuk memperbaiki PLTA di tiga desa sampai dengan 10 Februari 2007. Hingga akhir Maret 2007, proses perbaikan PLTA pada dua desa yaitu desa Sukaraja dan desa Ulak telah selesai dan sudah dilakukan musyawarah serah terima. Pada tanggal 25 April 2007 FK melakukan monitoring ke desa Alun Dua dan belum ada progres signifikan yang dilakukan oleh TPK dan Kades. Pada pertengahan Mei 2007, aliran listrik di desa Gunung Gare telah berfungsi untuk sementara tetapi untuk desa Alun Dua masih belum berfungsi. Pada bulan Juni 2007 telah dilaksanakan Musyawarah Khusus Serah Terima Kegiatan dengan bangunan sudah selesai tetapi belum berfungsi secara maksimal. Hingga akhir November 2007 belum ada progres signifikan.

- Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, provinsi Sulawesi Selatan: Berdasarkan hasil audit internal PPK pada UPK, ditemukan selisih di neraca sebesar Rp. 502.635.705,-. Berdasarkan beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pelaku-pelaku PPK di lokasi tersebut, dihasilkan bahwa pengurus UPK (ketua, sekretaris dan bendahara) mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam pertemuan antara Korprov dan Bupati Wajo pada tanggal 24 Januari 2007, Bupati menjamin untuk menyelesaikan kasus tersebut dan akan dikoordinasikan dengan Kapolres. Pada tanggal 31 Januari 2007 ada pengembalian dana dari ketua UPK sebesar Rp 5 juta sehingga total pengembalian sebesar Rp. 66.500.000,-. Pada tanggal 14 Maret 2007, forum UPK dan LSM lokal mengadakan konsolidasi untuk advokasi ke berbagai pihak guna mendorong penyelesaian masalah. Pada tanggal 26 Juni 2007 berkas sudah sampai di Kejaksaan namun penyidik Kejaksaan meminta penyidik Polres untuk melengkapi data keuangan. Pada tanggal 16 Agustus 2007 sudah terbentuk tim pengalihan aset/jaminan keluarga tersangka. Hingga akhir September 2007 belum ada progres signifikan. Pada tanggal 2 Oktober 2007 telah dilakukan pertemuan antara TK PNPM-PPK Kab. Wajo dengan pihak polres membahas penanganan kasus asmari (almarhum) setelah pihak keluarganya tidak mau menyerahkan asetnya ke UPK (sesuai pernyataan yang dibuat pihak keluarganya).
- Distrik Assue, Kabupaten Merauke, provinsi Papua. Pada bulan Januari 2004, dana matching grand sebesar Rp. 500.000.000,- telah dicairkan oleh camat (sekarang mantan) sebesar Rp. 303.200.050,- tanpa melalui mekanisme PPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada akhir Juni 2006, Monev bersama KM dan tim advokasi LSM Forpamer menghadap kepala kejaksaan negeri Merauke untuk menindaklanjuti kasus ini dan Kepala kejaksaan berjanji untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Hingga saat ini kasus mengalami stagnasi penanganan di kejaksaan. Pada akhir



November 2007 SP2M melakukan koordinasi dengan TK PPK Provinsi sehingga Sekda mengeluarkan surat kepada Bupati agar mendukung penanganan masalah.

- Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, provinsi Jawa Tengah: Ketua UPK (Adde Currie S.) telah menggunakan dana perguliran sebesar Rp. 257.703.995,- untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh yang bersangkutan setelah sebelumnya pada tahun 2005 juga telah melakukan hal yang sama dan telah selesai penanganannya pada September 2005 setelah pelaku mengembalikan seluruh uang yang diselewengkan sebesar Rp. 115.000.000,-. Sesuai hasil MAD pertanggungjawaban saat itu, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai pengurus UPK. Penanganan yang telah dilakukan untuk kasus kali ini diantaranya pada tanggal 27 September 2007 telah dilakukan MAD yang menghasilkan keputusan ketua UPK mengakui telah menyelewengkan dana dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2007, jika tidak terealisasi bisa diproses secara hukum. Selain itu, ketua dan sekretaris UPK akan mengundurkan diri setelah masalah selesai tanggal 30 Oktober 2007. Pada tanggal 31 Oktober 2007 dilakukan MAD Khusus dengan hasil: Ketua UPK (Adde Currie Siregar, ST) dan Sekretaris UPK / mantan Bendahara (Suhatiningsih) dinonaktifkan dan terbentuk pengurus baru serta penyelesaian masalah Sdri. Adde Currie Siregar, ST akan dilimpahkan ke jalur hukum. Pada tanggal 16 November 2007 diadakan rapat khusus pelaku-pelaku PPK yang dihadiri Bupati, Sekda, Ka. Barikda, Kakan PMD, Kasi PMD, Camat Karanggede dan KM yang hasilnya mendukung penyelesaian kasus hukum yang ditindaklanjuti dengan surat Bupati kepada Kepala Kejari Boyolali agar prosesnya dipercepat. Progres kejaksaan hingga akhir November 2007 baru tahap pemanggilan sebagian pelaku untuk dimintai keterangan.
- Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, provinsi Jawa Tengah: Penyalahgunaan dana UEP dan SPP yang dilakukan oleh TPK, ketua kelompok dan kepala desa di 5 desa dengan nilai total penyalahgunaan dana sebesar Rp. 169.976.190,-. Pada tanggal 24 Juli 2007 telah dilakukan MAD yang memutuskan bahwa pelaku diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah hingga Agustus 2007 dan bila tidak dilunasi akan dilanjutkan pada jalur hukum. Progres pengembalian sampai dengan bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp. 75.000.304,-. MAD evaluasi tanggal 26 November 2007 memutuskan penanganan melalui jalur hukum ditangguhkan untuk memberi tambahan waktu pada langkah pembinaan dan penagihan oleh tim yang dipimpin oleh Camat.



- c. **Penanganan Masalah Penyalahgunaan Dana**
Berdasarkan matrik bulan November 2007 tercatat 716 masalah penyalahgunaan dana dengan 691 diantaranya merupakan sisa proses bulan Oktober 2007 ditambah 25 kasus baru yang dilaporkan pada bulan November 2007. Dari 691 kasus sisa Oktober 2007, nilai penyalahgunaan dana mencapai Rp. 20.059.700.906,- dengan pengembalian sebesar Rp. 3.778.892.057,- sedangkan untuk 25 kasus baru selama November 2007, nilai penyalahgunaan mencapai Rp. 424.681.937,- dengan nilai pengembalian Rp. 41.097.168,-. Secara keseluruhan dari total 716 kasus pada bulan ini, nilai penyalahgunaan adalah Rp. 20.484.382.843,- dengan nilai pengembalian Rp. 3.819.989.225,-. Dari 716 kasus tersebut, 21 diantaranya selesai dan 695 masih dalam proses penanganan. Data selengkapnya masalah penyalahgunaan dana PNPM-PPK pada bulan November 2007 terdapat pada Tabel V lampiran.
- d. **Penanganan Masalah Melalui Hukum Formal**
Pada laporan bulan ini, jumlah masalah yang sudah diputuskan pengadilan sebanyak 35 kasus (data sementara yang dikumpulkan NMC) dimasukkan dalam rekapitulasi kasus hukum. Jumlah kasus dalam proses di kepolisian pada bulan ini adalah 97 kasus, dalam proses di Kejaksaan sebanyak 57 kasus, pengadilan 5 kasus dan tidak ada kasus dengan putusan tetap pengadilan sehingga total kasus dalam penanganan hukum adalah 194 kasus. Beberapa kasus yang sudah diputuskan pengadilan belum dimasukkan dalam laporan karena sedang dalam penelusuran amar putusan di lapangan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III lampiran.
- e. **Kendala Dalam Penanganan Masalah**
Beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah dalam bulan November 2007 diantaranya:
- a) **Kendala Administratif**
- Beberapa provinsi terlambat/tidak mengirimkan laporan softcopy ke Jakarta hingga batas waktu yang telah ditentukan;
 - Masih terdapat provinsi yang belum menyesuaikan format laporan sesuai kesepakatan; dan
 - Konsistensi tentang pengkategorian masalah yang kadang berubah menyulitkan dalam perekapan.
- b) **Kendala dalam Penanganan Masalah Implementasi Program**
- Masih banyak masalah yang progresnya tidak signifikan dalam beberapa bulan terakhir;



- Luasnya tugas dan tanggungjawab Spesialis MonEv menyebabkan dukungan terhadap penanganan masalah implementasi program menjadi kurang fokus dan kurang optimal;
- Kurangnya dukungan konsultan lapangan dalam penanganan masalah terutama di lokasi phase out karena lebih memprioritaskan progres kegiatan yang sedang berlangsung;
- Kurangnya dukungan aparat di beberapa wilayah terutama di lokasi phase out dalam mendorong penanganan masalah sehingga banyak masalah di lokasi phase out menjadi stagnan; dan
- Terdapat sekitar 152 masalah kronis yang dinilai sulit/ tidak mungkin diselesaikan karena sudah diluar batas kewenangan pelaku PPK namun masih tercatat dalam matrix/laporan bulanan nasional yang membutuhkan kebijakan pusat.

f. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada bulan Desember 2007 adalah:

- Mengevaluasi dan memberi umpan balik terhadap laporan bulanan penanganan masalah dari provinsi melalui email/memorandum untuk perbaikan pada bulan berikutnya;
- Membangun komunikasi yang lebih intensif dengan konsultan provinsi untuk mensupport penanganan masalah terutama untuk masalah yang dianggap sangat menonjol;
- Melakukan koordinasi dengan konsultan propinsi tentang temuan/ pengaduan yang diterima di tingkat pusat dengan memberikan alternatif solusi untuk ditindaklanjuti secara berjenjang;
- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Pembinaan PPK-Ditjen PMD berkaitan dengan penanganan masalah secara umum;
- Mengoptimalkan jalur layanan pengaduan dengan menggunakan fasilitas telepon/HP dengan nomor khusus, email dan website;
- Melakukan OJT kepada SP2M pada saat kunjungan lapangan maupun melalui Rakornas berkaitan dengan strategi mengantisipasi dan kiat mendorong penanganan masalah sesuai SOP Penanganan Masalah PPK;
- Menegaskan kembali kepada Konsultan provinsi bahwa penanganan masalah harus menjadi agenda penting dalam setiap rapat koordinasi secara berjenjang untuk mencari alternatif solusi bersama dalam mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah; dan



- Mendorong KM Provinsi, terutama SP2M, agar bersama KM-Kab membangun jaringan kerja sama dengan stake holder terkait secara berjenjang baik pihak internal maupun pihak eksternal PNPM-PPK dalam rangka bersama-sama mendorong percepatan penanganan masalah.

I. UNIT PENGELOLAAN KONSULTAN

1 Kegiatan bulan November 2007,

Kegiatan di bulan November 2007 antara lain meliputi : rekap hasil evaluasi kinerja konsultan dan fasilitator triwulan III periode Juli – September 2007, koordinasi dengan KM-Provinsi atas hasil seleksi aktif KM/FK gelombang 4, membuat estimasi peserta pelatihan pratugas KM/FK untuk tahun 2008, koordinasi dengan Sekretariat Nasional PNPM-PPK dan perusahaan jasa konsultan (PT. Amythas) mengenai mobilisasi untuk mengisi kekosongan di KM-Nasional dan KM-Provinsi, dan up date data black list dan kategori C konsultan.

2 Perkembangan Jumlah Konsultan Yang Bertugas

Konsultan aktif yang bertugas sampai 1 Desember 2007 berjumlah 5.061 orang dari jumlah quota sebanyak 5.293 orang, sehingga jumlah kekosongan konsultan sebanyak 232 orang. Secara umum terjadinya peningkatan jumlah konsultan yang bertugas (konsultan aktif) dari bulan sebelumnya, hal ini karena kekosongan di tingkat KM-Nasional dan KM-Provinsi sebagian besar sudah dimobilisasikan dari hasil seleksi promosi dan eksternal tahun 2007.

Jumlah quota sedikit mengalami perubahan yaitu bertambahnya quota di KM-Nasional posisi Advisor dan Asisten HRD. Untuk komposisi FK dan FT pada bulan ini untuk FK/FT Generasi rekapnya dipisah dari FK/FT reguler, hal ini agar memudahkan mengetahui jumlah FK/FT yang berada pada lokasi PNPM-Generasi, yang bulan sebelumnya rekapnya masih digabungkan dengan FK/FT reguler.

Secara rinci jumlah quota, konsultan terisi, dan kekosongan konsultan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Posisi Konsultan PNPM PPK Per 30 November 2007

<u>No</u>	<u>Posisi</u>	<u>Quota</u>	<u>Terisi</u>	<u>Kosong</u>
1	Konsultan Manajemen Nasional Pusat	54	43	11
2	Konsultan Manajemen Nasional Regional	28	26	2
3	Konsultan Manajemen Provinsi	187	167	20
4	Konsultan Manajemen Kabupaten	336	331	5
5	Konsultan Manajemen Teknik	336	327	9
6	Asisten KM-Kab.	2	2	0



<u>No</u>	<u>Posisi</u>	<u>Quota</u>	<u>Terisi</u>	<u>Kosong</u>
7	Pendamping UPK	79	59	20
8	Fasilitator Kecamatan	2003	1974	29
9	Fasilitator Teknik	1942	1815	127
10	Fasilitator Kecamatan Generasi	142	139	3
11	Fasilitator Teknik Generasi	116	115	1
12	Fasilitator Kecamatan Informasi	49	44	5
13	Fasilitator Kecamatan Pendidikan	19	19	0
Jumlah		5.293	5.061	232

3 Perkembangan Cadangan Konsultan Lapang

Cadangan konsultan yang ada pada saat ini berasal dari demobilisasi, hasil pelatihan yang belum dimobilisasi, dan hasil pelatihan praturgus tahun 2007. Jumlah cadangan secara nasional apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya cenderung mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar, hal ini dikarenakan di beberapa provinsi, cadangan sudah dimobilisasi untuk mengisi kekosongan yang ada.

Sebenarnya cadangan KM-Kab, KMT, FK, FK Gn, dan FT Gn secara nasional dapat memenuhi kebutuhan kekosongan yang ada, namun tidak semua konsultan/fasilitator bersedia ditempatkan di provinsi lain. Sedangkan untuk posisi Ass. KM-Kab, Pendamping UPK, FT, dan FKI cadangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan kekosongan yang ada, sehingga baik posisi yang bisa terpenuhi atau tidak dari cadangan nasional tetap harus melakukan rekrutmen di provinsinya masing-masing. Provinsi yang mempunyai cadangan fasilitator yang paling menonjol yaitu di Provinsi NTT dan Bali.

a. Tabel – Cadangan Konsultan Manajemen di Kabupaten

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah cadangan KM di Kabupaten sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>KM-Kab.</u>	<u>KMT</u>
1	Nangroe Aceh Darussalam	3	4
2	Sumatera Utara Daratan	3	1
3	Sumatera Barat	2	-
4	Bangka Belitung	2	-
5	Kalimantan Barat	2	1
6	Kalimantan Selatan	2	1
7	Kalimantan Tengah	2	-
8	Sulawesi Utara	2	-
9	Sulawesi Barat	2	-
10	Papua Barat	2	-
11	Kepulauan Riau	1	1
12	Bengkulu	1	1
13	Kalimantan Timur	1	-



<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>KM-Kab.</u>	<u>KMT</u>
14	Sulawesi Tenggara	1	1
15	Sulawesi Tengah	1	2
16	Maluku Utara	1	-
17	Jawa Barat	-	1
Jumlah		28	13

b. Tabel - Cadangan Konsultan Pendamping UPK

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah cadangan Konsultan Pendamping UPK sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>P -UPK</u>
1	Nangroe Aceh Darussalam	3
2	Nusa Tenggara Timur	1
3	Sumatera Utara Daratan	1
4	Jawa Timur	1
Jumlah		6

c. Tabel - Cadangan FK

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah cadangan Fasilitator Kecamatan sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>FK</u>
1	Nusa Tenggara Timur	48
2	Bali	9
3	Jawa Tengah	8
4	Lampung	7
5	Kalimantan Selatan	6
6	Bengkulu	4
7	Sumatera Utara P. Nias	4
8	Kalimantan Tengah	3
9	Kepulauan Riau	3
10	Sumatera Barat	2
11	Sulawesi Utara	2
12	Sulawesi Tenggara	2
13	Sulawesi Tengah	2
14	Nusa Tenggara Barat	2
15	Bangka Belitung	1
16	Kalimantan Barat	1
		104



d. Tabel - Cadangan FT

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah cadangan Fasilitator Teknis sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>FT</u>
1	Nusa Tenggara Timur	35
2	Bali	18
3	Sulawesi Barat	3
4	Kalimantan Selatan	2
5	Bengkulu	2
6	Sulawesi Selatan	2
7	Kalimantan Tengah	1
8	Sulawesi Tengah	1
	Jumlah	64

Adapun Cadangan FK Generasi dan FT Generasi hanya ada di NTT, masing-masing 5 orang (FK) dan 4 orang (FT). Cadangan FK Pn hanya ada 1 orang, yaitu di Kalimantan Selatan.

4 Lokasi Kosong dan Penyebab Kekosongan

Kekosongan konsultan di KM-Nasional Pusat terdapat 11 posisi, KM-Nasional Regional/Wilayah terdapat 2 posisi, dan di KM-Provinsi terdapat 20 posisi. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kekosongan tersebut telah menurun sebanyak 80 posisi yaitu dari 113 kekosongan (per 1 Nopember 2007) menjadi 33 kekosongan (per 1 Desember 2007).

Adapun penyebab berkurangnya kekosongan tersebut karena adanya seleksi promosi dan seleksi eksternal tahun 2007. Dan sebagian besar konsultan baru tersebut sudah dimobilisasikan ke lokasi tugas.

a. Tabel – Posisi Kosong Konsultan PNPM-PPK

No	Posisi Kosong	Jml
KM – Nasional Pusat		
1	Advisor Audit Keuangan Internal Pasca Bencana	1
2	Koord. Bid. Pengembangan Program	1
3	Koordinator Wilayah I/II/III/IV/V	5
4	Asisten Sp. HRD	1
5	Asisten Team Leader 1	1
6	Senior Spesialis MIS	1
7	Ass. Sp. Pilot Project P2SPP	1
	Jumlah - 1	11



KM – Nasional Regional / Wilayah

1	Sp. Audit Keuangan Wilayah VI	1
2	Sp. Fasilitator Training	1
	Jumlah - 2	2

KM – Provinsi

1	Koordinator Provinsi	1
2	Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah	2
3	Sp. MIS PNPM / PNPM Generasi	9
4	Ass. Sp. MIS PNPM / PNPM Generasi	1
5	Sp. FMS	4
6	Pembimbing Teknik Papua & Papua Barat	3
	Jumlah - 3	20
	Total 1 + 2 + 3	33

5 Kekosongan Konsultan Lapang

a. Kekosongan KM Kabupaten

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah kekosongan KM Kabupaten sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>Jml</u>
1	NTB	2
2	Jawa Tengah	1
3	Sulawesi Selatan	1
4	Maluku	1
	Jumlah	<u>5</u>

b. Kekosongan KM Teknik

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah kekosongan KM Teknik sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>Jml</u>
1	Papua	5
2	Kalimantan Tengah	2
3	Bali	1
4	Papua Barat	1
	Jumlah	<u>9</u>

c. Kekosongan Pendamping UPK

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah kekosongan Konsultan Pendamping UPK sebagai berikut :



<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>Jml</u>
1	Sumatera Selatan	3
2	Jawa Timur	3
3	Bengkulu	2
4	Bangka Belitung	2
5	Banten	2
6	NTT	2
7	Sumut Pulau Nias	1
8	Sumut Daratan	1
9	DI. Yogyakarta	1
10	Kalimantan Barat	1
11	Sulawesi Tenggara	1
12	Sulawesi Utara	1
Jumlah		<u>20</u>

d. Kekosongan FK

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah kekosongan Konsultan FK sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>Jml</u>
1	Papua	9
2	NAD	4
3	Kalimantan Selatan	3
4	Sulawesi Selatan	2
5	Kalimantan Barat	2
6	Papua Barat	1
7	Bengkulu	1
8	Banten	1
9	NTT	1
10	Sumut Pulau Nias	1
11	Riau	1
12	Kepulauan Riau	1
13	Lampung	1
14	Maluku Utara	1
Jumlah		29

e. Kekosongan FT

Dari 32 provinsi lokasi PNPM-PPK, teridentifikasi jumlah kekosongan Konsultan FT sebagai berikut :



<u>No</u>	<u>Provinsi</u>	<u>Jml</u>
1	Papua	17
2	Kalimantan Barat	15
3	Bali	14
4	Papua Barat	13
5	Jawa Tengah	12
6	Kalimantan Selatan	8
7	Gorontalo	8
8	Sulawesi Selatan	5
9	Maluku Utara	5
10	Sumut Pulau Nias	4
11	Banten	3
12	NTT	3
13	Kepulauan Riau	3
14	NTB	3
15	Bangka Belitung	3
16	Sulawesi Tenggara	3
17	NAD	2
18	Bengkulu	2
19	Riau	1
20	Lampung	1
21	Sumut Daratan	1
22	Jambi	1
Jumlah		127

- f. Kekosongan FK Gn, FT Gn, FKI dan FK Pn
 Kekosongan FK Generasi terjadi di Banten 1 orang, dan Sulawesi Barat 2 orang. Kekosongan FT Gn hanya terjadi di Bangka Belitung. Kekosongan FK Informasi terjadi di Jawa Tengah kosong 2, dan NTB kosong 3. FK Pn tidak ada kekosongan.

Kekosongan konsultan lapang sampai 1 Desember 2007 yang terbanyak enam posisi teratas secara berurutan terdapat di Papua 31 posisi, Sumatera Utara (Daratan = 7 posisi & Pulau Nias = 14 posisi) 21 posisi, Kalimantan Tengah 20 posisi, Papua Barat 15 posisi, Kalimantan Barat 14 posisi, dan Kalimantan Timur 11 posisi. Sedangkan provinsi yang tidak mempunyai kekosongan sama sekali ada di 4 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Dibandingkan bulan sebelumnya kekosongan konsultan lapang tidak mengalami penambahan ataupun penurunan kekosongan yaitu tetap 199 posisi. Namun demikian bukan berarti kekosongan konsultan lapang tidak mengalami progres pengisian akan tetapi di posisi Pendamping UPK mengalami penambahan kekosongan namun untuk



posisi FK dan FKI mengalami penurunan kekosongan. Terjadinya peningkatan kekosongan konsultan untuk posisi Pendamping UPK dikarenakan Pendamping UPK banyak yang dipromosikan menjadi spesialis di provinsi dalam hal ini untuk posisi FMS.

Kekosongan konsultan baik di tingkat KM-Nasional, KM-Provinsi, dan Konsultan Lapang telah diupayakan untuk pengisiannya, dengan cara sebagai berikut :

- Kekosongan di KM-Nasional dan KM-Provinsi tetap melaukan koordinasi baik dengan Sekretariat PNPM PPK maupun Perusahaan Jasa Konsultan untuk melakukan rekrutmen kembali.
- Untuk mengisi kekosongan KM-Kab. dan KMT dilakukannya promosi konsultan yang berasal dari fasilitator yang telah mempunyai kualifikasi dan hasil evaluasi kinerja baik dan rekrutmen baru dari eksternal.
- Kekosongan fasilitator akan diisi dari seleksi gelombang 4 yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember 2007.
- Diupayakan untuk melakukan relokasi lintas provinsi apabila dimungkinkan, dengan memberikan informasi kepada seluruh provinsi atas ketersediaan cadangan konsultan/fasilitator disemua provinsi setiap bulan.

g. Konsultan Keluar / PHK

Selama bulan November, PHK karena indisipliner sebanyak 2 FT. Dan mengundurkan diri sebanyak 14 orang, yang terdiri dari : KM Kab - 1 orang, FK - 3 orang, FT - 1 orang.

6 Progres Pengisian Kekosongan Konsultan

Selama bulan Nopember 2007 terjadi progres pengisian kekosongan konsultan mencapai 148 posisi, terutama progres terbanyak yaitu pada posisi KM-Provinsi. Dibandingkan bulan sebelumnya progres pengisian kekosongan mengalami penurunan dari 318 posisi menjadi 148 posisi. Pengisian kekosongan paling banyak justru terjadi pada tingkat KM-Nasional dan KM-Provinsi, hal ini hasil seleksi promosi dan seleksi eksternal sudah dimobilisasikan. Sedangkan progres yang terjadi di tingkat konsultan lapang diisi dari cadangan maupun relokasi konsultan.

Berikut ini adalah tabel kekosongan dan progres pengisian kekosongan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Progres Pengisian Kekosongan Konsultan



No	Posisi	Kekosongan Per 1 Nop 2007 (orang)	Pengisian di Nop 2007 (orang)	Kosong Per 1 Des 2007 (org)
1	Konsultan Manajemen Nasional Pusat	24	11	11
2	Konsultan Manajemen Nasional Regional	16	14	2
3	Konsultan Manajemen Provinsi	73	53	20
4	Konsultan Manajemen Kabupaten	2	1	5
5	Konsultan Manajemen Teknik	9	2	9
6	Asisten KM-Kab.	1	1	0
7	Pendamping UPK	3	1	20
8	Fasilitator Kecamatan	42	28	29
9	Fasilitator Teknik	126	26	127
10	Fasilitator Kecamatan Generasi	-	-	3
11	Fasilitator Teknik Generasi	-	-	1
12	Fasilitator Kecamatan Informasi	16	11	5
13	Fasilitator Kecamatan Pendidikan	0	0	0
	Jumlah	312	148	232

7 Perkembangan Rekrutmen

Untuk mengisi sisa kekosongan di tingkat KM-Nasional dan KM-Provinsi akan dilakukan rekrutmen kembali yang akan dipublikasikan di media cetak, millis, dan website. Sedangkan untuk konsultan lapang pada bulan Nopember 2007 sudah 6 Provinsi yang telah selesai melakukan selleksi aktif KM/FK yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Rekrutmen yang sudah dan akan dilaksanakan untuk mengisi posisi-posisi di KM-Nasional, KM-Provinsi, maupun konsultan lapang diharapkan pada awal tahun 2008 bisa tersi semua kekosongan konsultan.

8 Permasalahan

- a. Hasil evaluasi kinerja konsultan lapang triwulan III tahun 2007 beberapa provinsi belum mengirimkan hasilnya
- b. Masih terjadi beberapa Korprov tidak melakukan fungsinya dijalur fungsional, yang menyangkut pengiriman evaluasi kinerja dan pengendalian konsultan yang masih mengandalkan perusahaan jasa konsultan. Sehingga KM-Nasional masih harus meminta dan mengingatkan Korprov.
- c. SOP sebagai dasar pelaksanaan administrasi, masih belum difahami oleh sebagian Korprov, sehingga banyak hal kebijakan yang sudah baku tidak dijalankan oleh Korprov.
- d. Beberapa Korprov tidak melakukan verifikasi terhadap pengunduran diri konsultan/fasilitator, Korprov bersifat hanya sebagai penyampai



- surat saja sehingga tidak dapat terlihat adanya dampak akibat pengunduran diri tersebut
- e. Hasil rekapitulasi evaluasi kinerja yang dibuat untuk konsultan lapang, korprov kurang faham mekanisme sehingga penilaian cenderung subyektif, karena tidak dilakukannya pembahasan antar tiga unsur dan tanpa melakukan umpan balik dari hasil penilaian tersebut.
 - f. Masih terjadi kekosongan konsultan baik di tingkat KM-Nasional ataupun di KM-Provinsi, sehingga beberapa orang merangkap tugas akibat dari kekosongan posisi tersebut
 - g. Masih terjadi kurangnya validasi data yang dikirim dari KM-Provinsi

9 Rekomendasi

- a. Terus melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan KM-Provinsi
- b. Sebagai Korprov tetap melakukan jalur fungsional dalam segala hal keputusan, berkaitan dengan kebijakan di lapang dan melaporkan ke TL KM-Nasional.
- c. Perlu adanya penjelasan ulang atau penegasan perihal SOP dan panduan evaluasi kinerja konsultan yang sudah baku dalam pertemuan khusus
- d. Mengidentifikasi kekosongan secara rutin dan melaporkan hasil identifikasi kekosongan ke Satker Pusat untuk segera melakukan rekrutmen konsultan
- e. Terus melakukan edit dan validasi data setiap kiriman data dari provinsi sebelum data dipergunakan dan memberikan feed back ke KM-Provinsi apabila terjadi data yang tidak akurat.

